

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan transportasi publik di Kabupaten Banyumas melalui studi kasus pada Bus Trans Banyumas secara umum telah berjalan dengan cukup optimal. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan koordinasi antar instansi seperti Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik, didukung oleh kegiatan rapat rutin dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan karena masih ditemukan masyarakat yang belum memahami sistem pembayaran non-tunai dan alur rute secara menyeluruh. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan, baik di tingkat pemerintah daerah, operator transportasi, maupun instansi terkait lainnya, dengan dukungan terhadap pengangkatan staf yang sesuai kompetensi dan pemberian insentif berbasis kinerja. Struktur birokrasi yang diterapkan juga sudah mendukung pelaksanaan kebijakan secara efisien, dengan adanya pembagian peran yang jelas antara regulator, pengawas, operator, dan pihak pengelola manajemen layanan. Di sisi lain, aspek sumber daya manusia telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, dan kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek sarana dan prasarana, khususnya keterbatasan halte yang belum sepenuhnya representatif, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan kenyamanan layanan. Oleh karena itu, meskipun secara umum implementasi kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif, perbaikan terhadap infrastruktur pendukung tetap diperlukan guna mencapai pelayanan transportasi publik yang lebih optimal dan merata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar implementasi kebijakan transportasi publik Trans Banyumas ditingkatkan melalui beberapa aspek strategis. Pada aspek komunikasi, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai keberadaan, sistem pembayaran, dan rute Trans Banyumas, yang idealnya dilakukan secara rutin agar informasi yang diterima bersifat jelas, konsisten, dan merata. Dari sisi disposisi, penting bagi operator untuk

memberikan apresiasi kepada pelaksana kebijakan seperti pengemudi dan staf melalui kegiatan yang membangun motivasi dan kompetensi, seperti outbound atau studi banding ke daerah lain. Pada aspek struktur birokrasi, penguatan sistem pengawasan internal harus dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja pengemudi secara berkala serta menerapkan sanksi dan pembinaan secara berjenjang bagi pelanggaran SOP, guna menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sementara itu, dalam aspek sumber daya, sinergi antara Dinas Perhubungan dan operator perlu difokuskan pada pembangunan dan perawatan halte yang representatif, lengkap dengan fasilitas pendukung yang memadai, serta pemeliharaan armada secara berkala. Dengan upaya perbaikan menyeluruh pada aspek komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya, diharapkan implementasi Trans Banyumas dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Kabupaten Banyumas secara efektif dan efisien.

